

# JURNAL INTERAKSI DIAN NINIS SETYOWATI.doc

by ayu270223@gmail.com ayu270223@gmail.com

---

**Submission date:** 06-Feb-2025 06:03AM (UTC+0300)

**Submission ID:** 2580871620

**File name:** JURNAL\_INTERAKSI\_DIAN\_NINIS\_SETYOWATI.doc (94K)

**Word count:** 2022

**Character count:** 13417

**IMPLEMENTASI PERPRES <sup>2</sup>  
NOMOR 33 TAHUN 2020  
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA REGIONAL  
TERHADAP PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD  
DI KABUPATEN NGANJUK)**

\**Dian, Ninis, Setyowati*<sup>3</sup>

1)Prodi atau Jurusan Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosila dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

2)Prodi atau Jurusan..., Fakultas..., Universitas..., Indonesia

3)Prodi atau Jurusan..., Fakultas..., Universitas..., Indonesia

\*Email Korespondensi : Email@firstauthor.ac.id

<b>Kata Kunci:</b> <i>Implementasi; Perpres; APBD.</i>	<b>Abstrak {Font: Arial, size : 11, Bold}</b> Tujuan penelitian ini adalah pertama Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Kedua, Mendeskripsikan dan menganalisis faktor Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Implementasi Peraturan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Nganjuk berjalan <sup>3</sup> lukup baik. The aim of this research is first to describe and analyze the implementation of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 33 of 2020. Second, describe and analyze what factors hinder and support the implementation of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 33 of 2020 concerning Regional Unit Price Standards for Planning and Implementation of Regional Revenue and Expenditure Budgets in Nganjuk Regency. This research uses qualitative research. This type of qualitative research uses descriptive analysis methods. The results of research on the implementation of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 33 of 2020 concerning Regional Unit Price Standards for Planning and Implementation of Regional
---	---

Revenue and Expenditure Budgets in Nganjuk Regency are going quite well

**Keywords:** Keywords consist of 3 to 5 words and / or word groups; Written in order of urgency of words; Between keywords separated by semicolon (;).

**Abstract {Font: Arial, size : 11, Bold}**

*Abstract written in Indonesian and English with the following provisions: 1 paragraph, 1 space, font size 11 pt, arial. 200 words maximum. Abstract contains the research objectives, design / research methods used, as well as the results / research findings.*

## PENDAHULUAN

Secara umum, Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih terstruktur dan transparan dalam penetapan harga-harga di tingkat regional, sehingga tidak ada lagi gap/jarak pembangunan antar pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Namun dalam pelaksanaannya di Kabupaten Nganjuk masih ditemui kendala-kendala yaitu :

- a. Standar Harga yang belum diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2020;
- b. Sudah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2020 namun angka yang terlalu besar atau kecil;
- c. Adanya kepentingan politik yang masih membayangi dalam penyusunan standar satuan harga.

## METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif atau gambaran terhadap sesuatu yang di teliti. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2017:

6), metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati

Penelitian ini menggunakan teknik dan alat perolehan data, sebagai berikut :

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

3 Metode penelitian memberikan informasi secara ringkas mengenai materi dan metode yang digunakan dalam penelitian, seperti teknik pengambilan sampel, variable yang akan diukur, teknik pengambilan data, analisis dan model statistik yang digunakan. Hindari penulisan rumus statistik secara berlebihan. Untuk penelitian kualitatif, metode penelitian dapat menyesuaikan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel Matriks Hasil Penelitian**

Permasalahan	Fokus	Data Hasil Wawancara	Temuan Peneliti
<span style="background-color: #e0e0e0; border-radius: 50%; padding: 2px 5px;">4</span> Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran	Komunikasi Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indikator transmisi dan indikator kejelasan ditemukan dengan kondisi penyampaian peraturan yang baik dengan kendala. Meskipun terkadang masih dijumpai misskomunikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Positif : sosialisasi peraturan yang baik terhadap pemerintah daerah</li> <li>Negatif : pemerintah daerah masih perlu adaptasi dengan penjelasan perpasal yang berjenjang dan menunggu waktu</li> </ul>

<b>Permasalahan</b>	<b>Fokus</b>	<b>Data Hasil Wawancara</b>	<b>Temuan Peneliti</b>
Pendapatan Dan Belanja Daerah		<p>b) Sumberdaya Fasilitas Sarana mencakup Komputer, printer, Meja, Kursi,..dsb. sedangkan Prasarana adalah Gedung dan ruangan.</p> <p>c) Sumber daya Informasi di distribusikan belum berjalan dengan optimal dengan beberapa perubahan anggaran.</p> <p>d) Wewenang dimiliki pelaksana sesuai Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk</p>	kebutuhan. Negatif : -

Permasalahan	Fokus	Data Hasil Wawancara	Temuan Peneliti
	Disposition	- Pemilihan pelaksana pegawai berubah tidak ditemukan kesalahpahaman dengan memilih pegawai berdasarkan pendidikan dan kemampuannya	Positif : pelaksana bekerja dengan efektif tanpa insentif khusus. Negatif : -
	Struktur Birokrasi	- standar operasional prosedur sesuai aturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Nganjuk	Positif : seluruh bagian berjalan sesuai dengan pedoman SOP yang ada dan setiap bagian terfragmentasi dengan baik. Negatif : -

### Pembahasan

Guna mengkaji penelitian Implementasi Peraturan Presiden

2

Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga

Regional Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Nganjuk menggunakan

teori Edward. Teori Edward untuk memperhatikan empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif sebagai berikut.

- a. Komunikasi
- b. Sumber Daya (*resource*)
- c. Disposisi
- d. Struktur Birokrasi

Faktor penghambat dalam proses pelaksanaan Standar Satuan

Harga Regional Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut.

1  
a. Perubahan Harga yang Terjadi di Tahun Pelaksanaan Anggaran

Salah satu masalah yang menyebabkan program Standar Satuan Harga Regional tidak berjalan adalah adanya kenaikan harga pasar dalam satu satuan biaya yang di atur dalam perpres 33 tahun 2020. Maka dalam hal ini, BPKAD perlu merancang anggaranb sedemikian rupa yang tidak menyalahi acuan dalam peraturan namun sesuai dengan kondisi pasar agar kegiatan dan program tetap terlaksana.

1  
b. Salah Input Standar Satuan Harga Pada Rincian Anggaran Belanja SKPD/UKP

1  
Salah input data satuan harga standar satuan harga pada rincian anggaran belanja SKPD/UKPD, hal ini disebabkan kurang teliti dalam memilih standar harga satuan yang sesuai dengan indikator capaian program anggaran belanjanya. Hal ini juga merupakan bentuk Pengendalian Internal Yang Tidak Dijalankan Dengan Baik oleh SKPD/UKPD. Hasil observasi peneliti Karena masih adanya SKPD/UKPD yang menyerahkan tugas penyusunan anggarannya kepada pegawai non ASN.

c. Peran TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dalam melakukan supervisi pada rincian anggaran belanja belum optimal..

perlunya supervisi ekstra oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Setiap kesalahan yang tidak terdeteksi merupakan bentuk kesalahan supervisi TAPD yang tidak optimal. Maka dalam hal ini perlu sinergitas petugas input data dan juga TAPD dalam input satuan harga regional yang diterapkan sesuai Perpres 33 tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SSHR) dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nganjuk.

Sedangkan faktor pendukung pelaksanaan standar satuan harga regional berdasarkan beberapa indikator adalah sebagai berikut.

- a. Responsibilitas Para Pegawai dalam mengatasi kesalahan input Seluruh pegawai memiliki komitmen dalam menjalankan setiap pekerjaan termasuk dalam menjalankan standar satuan harga regional sehingga masalah yang di hadapi dalam pengelolaan anggaran tidak berlarut sampai mengorbankan pelayanan dan program yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal ini nampak pada hasil kinerja tahun 2023 yang seluruhnya mencapai target 100%

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah dijelaskan pada bab terdahulu maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Presiden Indonesia Nomor 33 Tahun 2020

tentang Standar Satuan Harga Regional Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Nganjuk cukup baik, hal tersebut berdasarkan pada :

a. Komunikasi,

Komunikasi berjalan baik mengingat BPKAD Kabupaten Nganjuk dapat melaksanakan dan beradaptasi dengan baik dengan adanya Perpres 33 tahun 2020. Antisipasi pelaksanaan Peraturan ini dengan Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan amanat dari Perpres tersebut.

b. Sumber Daya,

Sumber daya cukup baik dengan memenuhi 4 aspek sumber daya. Sumberdaya yang memenuhi adalah sumber daya manusia, fasilitas wewenang dan sumberdaya informasi.

c. Disposisi,

Penyerahan kewenangan sudah berjalan dengan baik diberikan kepada pegawai BPKAD Kabupaten nganjuk sesuai dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Bersifat Khusus Kabupaten Nganjuk.

d. Struktur Birokrasi,

seluruh bagian berjalan dengan baik sesuai dengan pedoman Standar operasional prosedur sesuai aturan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Nganjuk.

2 Faktor Pendukung Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Nganjuk adalah :

- Responsibilitas Para Pegawai dalam mengatasi kesalahan input.

Sedangkan Faktor Penghambat Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Regional Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Nganjuk adalah :

- Perubahan Harga yang Terjadi di Tahun Pelaksanaan Anggaran.
- Salah Input Standar Satuan Harga Pada Rincian Anggaran Belanja SKPD/UKP.

- 1  
- Peran TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dalam melakukan supervisi pada rincian anggaran belanja belum optimal.

### Saran

1. Perlu lebih meningkatkan komunikasi terutama komunikasi dengan pihak luar berkaitan dengan adanya kajian pangsa pasar secara mendalam agar satuan harga yang berubah tidak mempengaruhi terselenggaranya program dan kegiatan BPKAD Kabupaten Nganjuk.
2. Perlu adanya peningkatan ketrampilan dan kemampuan Sumber daya terutama sumber daya manusia dengan pelatihan untuk konsistensi dan kecermatan pegawai dalam mengerjakan setiap input satuan harga dalam sistem informasi.
3. Perlu adanya peningkatan Struktur Birokasi dimana struktur ini adalah peran TAPD agar melakukan supervisi rincian anggaran secara mendalam.

## REFERENSI

- Alwi, Syafaruddin. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Strategi Keunggulan Kompetitif* (Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi)
- D.L, Weimer, and Vening A.R. 2005. *Policy Analysis, Concepts And Practice, Fourth Edition* (New Jersey: Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River)
- Dunn, William N. 2017. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Edisi kedu (Yogyakarta: Gajah Mada University Press)
- Fattah, Nanang. 2017. *Analisis Kebijakan Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya)
- Frederick, William C., Keith Davis, and James E. 1998. *Post. Business and Society, Coeporate Strategy, Publik Policy, Ethics Sixth Edition* (New York: McGraw-Hill Publishing Company)
- Islamy, M. I. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara* (Jakarta: Bina Aksara)
- Jones, Charles O. 2004. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy)*, ed. by Editor Nashir Budiman (Jakarta: Rajawali Pers)
- Koontz, and Weihrich. 2015. *Manajemen*, Jilid dua (Jakarta: Erlangga)
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya.)
- Mudjia, Rahardjo. 2010. *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Press)
- Muhammad. 2018. Birokrasi, Kajian konsep teori menuju Good Governance (Lhokseumawe:Unimal Press)
- Noeng H, Muhadjir. 2013. *Metodologi Penelitian Kebijakan Dan Evaluasi Research* (Yogyakarta: Rake Sarakin)
- Nugroho, Riant. 2017. *Publik Policy* (Jakarta: Alex Media Komputindo)
- Patton, and Sawicki. 1986. *Basic Methods Of Policy Analysis And Planning, Whitelhall* (Wellington New Zaeland: Book Liited)
- Purwanto, and Sulistyastuti. 2021. *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep Dan Aplikasi Di Indonesia* (Jakarta: Gava Media)
- Rifal, and Sulaeman. 2016. 'Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Distribusi Beras Miskin ( Raskin ) Di Desa Tolongan Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala', *Agrotekbis*, Vol 4.5: 1–9
- Samodra, Wibawa. 2004. *Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Balai Pustaka)

- Silalahi, Ulber. 2018. *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Revika Aditama)
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretatif, Interaktif Dan Konstruktif* (Bandung: Alfabeta)
- Tangkilisan, H. N. S. 2017. *Evaluasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Geasindo)
- Usman, Husaini, Akbar, and Purnomo S. 2017. *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara)
- Wahab. 2010. *Analisis Kebijakan Dan Formulasi Ke Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Bumi Aksara)
- Winarno, Budi. 2014. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media Pressindo)
- Zuswana, Aries. 2021. ‘Evaluasi Implementasi Program Outsourcing Di PT Elnusa Petrofin’, *Sosio E-Kons*, 15.1: 90  
[<https://doi.org/10.30998/sosioekons.v15i1.16667>](https://doi.org/10.30998/sosioekons.v15i1.16667)

#### **JURNAL**

- Dio, and Syahrullah. 2014. ‘Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Banten Tahun 2009-2012’, *Skripsi*: 1–108  
[<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29240>](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/29240)
- Putri, Z A. 2019. ‘Pengaruh Desain Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Pada Perum Perumnas Regional I Medan’: 1–72  
[<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10725%0Ahttp://repository.uma.ac.id:8081/bitstream/123456789/10725/1/158320023 - Zakia Aida Putri - Fulltext.pdf>](http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10725%0Ahttp://repository.uma.ac.id:8081/bitstream/123456789/10725/1/158320023 - Zakia Aida Putri - Fulltext.pdf)
- nizarsyah, faizal, and Priyanto. 2023. ‘Implementasi Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Dalam Pelaksanaan APBD Faishal Nizarsyah, Priyanto’, *SMIA Edisi Khusus Tema Kebijakan Publik Tahun 2023*: 245–52

#### **PERATURAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (SSHR)

Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/21/K/411.020/2024 Tentang  
Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penyusunan Standar Harga Satuan  
Pemerintah Kabupaten Nganjuk

# JURNAL INTERAKSI DIAN NINIS SETYOWATI.doc

---

ORIGINALITY REPORT

---

**22%**  
SIMILARITY INDEX

**25%**  
INTERNET SOURCES

**13%**  
PUBLICATIONS

**15%**  
STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

---

- |          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>www.researchgate.net</b><br>Internet Source   | <b>7%</b> |
| <b>2</b> | <b>dulohupa.id</b><br>Internet Source            | <b>6%</b> |
| <b>3</b> | <b>ojs.unik-kediri.ac.id</b><br>Internet Source  | <b>6%</b> |
| <b>4</b> | <b>jurnal.untag-sby.ac.id</b><br>Internet Source | <b>3%</b> |
- 

Exclude quotes      On

Exclude matches      < 3%

Exclude bibliography      On